

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

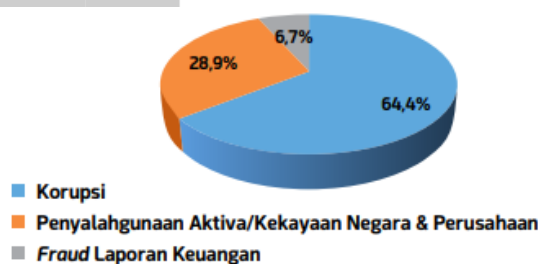
Kecurangan akuntansi di Indonesia masih dianggap sebagai budaya turun temurun dan sulit untuk dihilangkan. Menurut Suarniti & Ratna Sari (2020), kejahatan ekonomi yang terus meningkat mengakibatkan para pemangku kepentingan menganggap kecurangan akuntansi menjadi masalah yang sangat serius dalam suatu organisasi.

Menurut Rizky & Aida Fitri (2017), kecurangan merupakan tindakan seseorang yang dengan sengaja melakukan suatu kesalahan yang merugikan pihak lain untuk mendapatkan keuntungan. Dalam lingkup akuntansi, kecurangan merupakan bentuk penyimpangan dari prosedur akuntansi yang sudah diterapkan oleh suatu organisasi dan dapat menimbulkan kesalahan pada laporan keuangan yang disajikan.

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) kecurangan akuntansi dapat digolongkan menjadi tiga jenis yaitu kecurangan aset yang berupa pencurian ataupun penyalahgunaan aset, pernyataan palsu atau salah pernyataan yang berupa tindakan untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya, dan korupsi yang berupa tindakan yang dilakukan dengan menggunakan pengaruhnya secara tidak sah dalam suatu transaksi untuk memperoleh manfaat bagi kepentingan pribadi atau orang lain.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan ACFE Indonesia pada tahun 2019, menunjukkan kecurangan yang paling banyak di Indonesia adalah korupsi dengan

presentase 64,4%. Selanjutnya kecurangan bentuk penyalahgunaan aktiva dengan presentase 28,9% dan kecurangan laporan keuangan dengan presentase 6,7%. (<https://acfe-indonesia.or.id/survei-fraud-indonesia>).



Gambar 1.1
Fraud yang terjadi di Indonesia

Kecurangan dalam laporan keuangan dapat menyebabkan informasi yang dihasilkan menjadi tidak valid dengan mekanisme keyakinan bahwa laporan keuangan tidak dipengaruhi oleh salah saji yang material. Menurut Mardianto & Tiono (2019) kecurangan akuntansi akan menyebabkan data laporan keuangan menjadi tidak objektif sehingga memungkinkan terjadinya kesalahan penggunaan informasi untuk proses menentukan keputusan, dan juga dapat menimbulkan kerugian negara.

Fadhilah et al. (2021) menjelaskan bahwa pada sektor swasta kecurangan dapat terjadi pada ketidaktepatan penggunaan sumber dana belanja. Sedangkan pada sektor pemerintahan kecurangan dapat terjadi pada manipulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kecurangan akuntansi dapat dipicu atau dipengaruhi oleh faktor perusahaan maupun oleh individu.

Fenomena kecurangan akuntansi yang terjadi di Indonesia yaitu adanya manipulasi laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor untuk tahun anggaran 2021. Kecurangan tersebut dilakukan oleh Bupati Bogor Ade Yasin dan

anak buahnya yakni Maulana Adam (Sekdis PUPR Kabupaten Bogor), Ihsan Ayatullah (Kasubid Kas Daerah BPKAD), dan Rizki Taufik ((PPK) pada Dinas PUPR).

Dari hasil audit BPK, terdapat temuan janggal pada laporan keuangan terkait proyek peningkatan jalan Kandang Roda-Pakan Sari. Ade Yasin melalui anak buahnya memberikan uang dugaan suap dengan nilai total Rp1,9 miliar kepada para tim pemeriksa dari BPK Jabar. Ade Yasin diduga memerintahkan tiga anak buahnya untuk mengupayakan Pemkab Bogor mendapat opini WTP. (<https://nasional.okezone.com>)

Kasus kecurangan juga terkait dengan manipulasi laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun anggaran 2020. Para pihak yang ditahan adalah Andy Sonny selaku Kepala Perwakilan BPK Sultra/Mantan Kasuauditorat Sulsel I BPK Perwakilan Provinsi Sulsel, Yohanes Binur Haryanto Manik selaku Pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Sulsel, Wahid Ikhsan Wahyudin selaku Mantan Pemeriksa Pertama BPK Perwakilan Provinsi Sulsel/Kasubbag Humas dan Tata Usaha BPK Perwakilan Provinsi Sulsel, dan Gilang Gumilar selaku Pemeriksa pada Perwakilan BPK Provinsi Sulsel/Staf Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulsel.

Andy Sonny dan rekannya diduga menerima Rp2,8 miliar untuk mengkondisikan laporan keuangan proyek yang dikerjakan Dinas PUTR Sulawesi Selatan. Dalam pemeriksaan laporan keuangan tahun 2020 terdapat item temuan terkait beberapa proyek pekerjaan yang nilai pagu anggarannya diduga di-*mark up* dan hasil pekerjaan juga diduga tidak sesuai dengan kontrak. Atas temuan

tersebut, Edy Rahmat kemudian berinisiatif agar hasil temuan dari tim pemeriksa dapat direkayasa sedemikian rupa seperti tidak dilakukan pemeriksaan pada beberapa item pekerjaan yang menjadikan nilai temuan menjadi kecil, hingga menyatakan hasil temuan menjadi tidak ada. (<https://kabar24.bisnis.com>)

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien. Salah satu tugas pemerintah adalah untuk memastikan bahwa keuangan negara dikelola dengan baik dan *accountable*. Namun menurut Arsad et al., (2018) saat ini banyak terjadi kecurangan akuntansi dilakukan oleh oknum pemerintah yang dapat menimbulkan kerugian negara dan secara tidak langsung akan merugikan masyarakat.

Menurut Chasanah (2018), tidak adanya pengendalian internal yang berfungsi sebagai pengawasan, tidak adanya aturan dalam akuntansi, tidak etisnya perilaku, tidak adanya kejujuran dan tidak adanya peraturan menyebabkan kinerja karyawan menjadi buruk. Hal tersebut juga dapat menjadi faktor terjadinya kasus kecurangan akuntansi.

Faktor yang dapat mempengaruhi kecurangan akuntansi Menurut Puspitarani (2019), yaitu menerapkan dan mendisiplinkan Standar Operasional Prosedur (SOP). Standar Operasional Prosedur (SOP) berfungsi membentuk sistem kerja yang teratur, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan tepat dibutuhkan sebagai acuan dalam melaksanakan pekerjaan (Sulam et al., 2019).

Menurut Handayani (2021) tujuan Standar Operasional Prosedur (SOP) di sektor pemerintah adalah menciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan

oleh satuan unit kerja untuk mewujudkan *Good Governance*. Dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) akan meningkatkan kualitas laporan keuangan dan juga dapat meminimalisir kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Puspitarani (2019) Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan salah satu faktor yang berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan akuntansi. Dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) maka kecurangan lebih mudah untuk dihindari karena Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan suatu pedoman mengenai tugas, tanggung jawab, dan sanksi untuk karyawan yang diberi wewenang.

Faktor lain yang mempengaruhi kecurangan menurut Melasari & Sukeji (2022) adalah penggunaan Sistem Informasi Akuntansi (SIA). Sistem Informasi Akuntansi (SIA) merupakan sebuah sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengelola data dengan penerapan teknologi software maupun hardware yang canggih. Menurut Syah Pahlevi & Ari Pertiwi (2021), sistem informasi akuntansi menyediakan informasi keuangan untuk digunakan sebagai peramalan, ataupun pengambilan keputusan untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

Menurut Chasanah (2018) terdapat komponen-komponen dalam sistem informasi akuntansi yaitu komponen orang yang mengoperasikan sistem dan melakukan berbagai fungsi, komponen procedure yang merupakan proses akuntansi yang berhubungan kegiatan organisasi, software dan infrastruktur informasi teknologi seperti komputer dan peralatan lainnya. Terkadang

komponen-komponen tersebut dapat mengalami erorr atau kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja.

Pada penelitian yang dilakukan Ryan & Ridwan (2017) menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif sistem informasi akuntansi terhadap kecurangan akuntansi. Dalam penerapan sistem informasi akuntansi, secara signifikan dapat memberikan pengaruh timbulnya risiko keamanan data dan salah saji material dalam laporan keuangan, baik yang terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja. Sedangkan pada penelitian Syah Pahlevi & Ari Pertiwi (2021) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kecurangan akuntansi menurut Pratama (2022) adalah ketaatan aturan akuntansi. Aturan akuntansi berisi aturan-aturan yang harus digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Aturan akuntansi ini berpedoman pada aturan yang telah dibuat oleh IAI. Ketaatan aturan akuntansi diperlukan untuk menjaga keandalan laporan keuangan yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.

PP RI No 24 tahun 2005, menyatakan bahwa ketaatan aturan akuntansi pada sektor pemerintahan diartikan sebagai suatu kesesuaian dalam pelaksanaan kegiatan akuntansi, penyajian laporan keuangan, dan pelaksanaan pengelolaan aset suatu organisasi dengan aturan yang telah ditentukan dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Penyusunan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan aturan akuntansi dapat menyebabkan manipulasi pada aset dan laporan keuangan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2022) menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif dan signifikan ketaatan pada aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Semakin paham dan taat karyawan pada aturan akuntansi maka semakin rendah tingkat kecurangan akuntansi yang akan terjadi. Sedangkan pada penelitian Purwati (2020) menyatakan bahwa ketaatan aturan akuntansi tidak berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi.

Menurut Purwati (2020) kesesuaian kompensasi memiliki pengaruh terhadap kecurangan akuntansi. Kompensasi adalah bentuk imbalan yang diterima oleh pegawai dari pelaksanaan di organisasi dalam bentuk uang atau lainnya yang dapat berupa gaji, upah, bonus, insentif dan tunjangan lainnya. Pemberian kompensasi yang tidak sesuai dapat mendorong karyawan untuk melakukan kecurangan.

Menurut Rahmi & Helmayunita (2019) jika kompensasi dikelola instansi dengan baik maka akan membantu instansi untuk menggapai tujuan dari suatu instansi. Dengan memberikan kompensasi akan memudahkan instansi dalam memperoleh, memelihara, serta mengawal pegawai dengan baik. Tanpa kompensasi yang sesuai maka dapat mendorong karyawan untuk bertindak curang ataupun sampai meninggalkan instansi.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2022) menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif dan signifikan kesesuaian kompensasi terhadap kecurangan akuntansi. Pemberian kompensasi yang sesuai terhadap karyawan dapat membuat karyawan merasa puas dan termotivasi dalam bekerja sehingga mendorong mereka untuk memberikan yang terbaik bagi instansi. Sedangkan pada

penelitian Irwansyah & Syufriadi (2019) menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi.

Berdasarkan pendekatan teori agensi, terdapat perbedaan kepentingan antara principal (pemangku kepentingan) dan juga agen (manajemen). Perbedaan kepentingan yang terjadi yaitu pemangku kepentingan ingin agar laporan keuangan perusahaan disajikan dengan laba yang besar, sedangkan manajemen ingin mendapatkan bonus yang besar. Dengan perbedaan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan yang memungkinkan bagi manajemen untuk bertindak tidak sesuai atau melakukan kecurangan (Renata & Yudowati, 2020).

Berdasarkan penjelasan fenomena dan perbedaan hasil dari penelitian sebelumnya maka penelitian ini penting dilakukan karena peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh Standar Operasional Prosedur (SOP), efektivitas sistem informasi akuntansi, ketaatan akuntansi dan kesesuaian kompensasi terhadap kecurangan akuntansi.

1.2 Perumusan Masalah

1. Apakah Standar Operasional Prosedur (SOP) berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi?
2. Apakah efektivitas Sistem Informasi Akuntansi (SIA) berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi?
3. Apakah ketaatan aturan akuntansi berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi?
4. Apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Standar Operasional Prosedur (SOP) pada suatu perusahaan terhadap kecurangan akuntansi.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh efektivitas sistem informasi akuntansi pada suatu perusahaan terhadap kecurangan akuntansi.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap kecurangan akuntansi.
4. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecurangan akuntansi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada literatur-literatur terdahulu tentang pengaruh Standar Operasional Prosedur (SOP), efektivitas sistem informasi akuntansi, ketaatan aturan akuntansi, dan kesesuaian kompensasi terhadap kecurangan akuntansi.
2. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP), efektivitas sistem informasi akuntansi, ketaatan aturan akuntansi, dan kesesuaian kompensasi terhadap kecurangan akuntansi.
3. Bagi penelitian yang akan datang, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi yang dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan Proposal

Agar proposal ini tersusun dengan baik maka diperlukan Sistematika penulisan proposal sebagai berikut :

1. BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penelitian.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan kemudian dilanjutkan dengan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis dan desain penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel penelitian, variabel dan pengukuran, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

4. BAB IV GAMBARAN SUBJEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum subyek penelitian yaitu karakteristik responden, hasil analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasan atas hipotesis penelitian.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari pembahasan hipotesis, keterbatasan selama penelitian dan saran untuk pengembangan penelitian.